

REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Abdurrohman Al Asy'ari

Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo
abdurrohman.asyari@yahoo.co.id

Abstract

The reality of the conflicts that have occurred in the past few years has positioned multicultural education to be important to implement. Therefore, the reconceptualization of multicultural education is needed in order to adjust the conditions in Indonesia. This can be done by looking at the basis of the need for multicultural education, the function of multicultural education in the Indonesian context, and how to implement it. The results are (a) the multi-cultural reality of the Indonesian nation which consists of various kinds of religions, tribes, cultures and others which undoubtedly require relevant multicultural education to be the basis for the concept of multicultural education besides the basis of the Indonesian state with the motto Bhineka Tunggal Ika rooted in Indonesian people themselves; (b) Education functions as a pre-emptive tool against conflicts of ethnic and religious interests, as a tool to foster a willingness to succumb to elite-desirable preference, instill ethnicity as a source of essential wealth possessed by humans to know each other and enrich culture, and become wrong one social networking media; and (c) Implementation of multicultural education at the level of primary and secondary education, can be done comprehensively through citizenship education and through Religious Education, can be done through empowering curriculum slots or adding or expanding competency in learning outcomes in the context of noble moral formation, having the intensity to fostering and developing harmony of life between religious communities, by emphasizing various basic competencies as described above. Then, it must also be done in a deductive approach with relevant studies, then developed into religious norms, legal norms, ethics, and social norms.

Keywords: Multicultural Education, Reconceptualization

Abstrak

Realitas konflik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memosisikan pendidikan multikultural menjadi penting untuk diterapkan. Oleh karena itu, rekonseptualisasi pendidikan multikultural diperlukan dalam rangka menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat dasar perlunya pendidikan multikultural, fungsi pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia, dan bagaimana strategi penerapannya. Hasilnya adalah (a) Realitas bangsa Indonesia yang multi kultur di mana terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya dan lainnya menjadi niscaya bahwa pendidikan multikultur relevan menjadi dasar perlunya konsep pendidikan multikultural selain karena dasar negara Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang telah mengakar dalam diri masyarakat Indonesia; (b) Pendidikan berfungsi sebagai alat prefentif terhadap terjadinya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama, sebagai alat untuk menumbuhkan sikap mau mengalah dari preference yang dikehendaki elit, menanamkan etnisitas sebagai sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya, serta menjadi salah satu media jejaring sosial; dan (c) Implementasi pendidikan multikultur pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan kewargaan dan melalui Pendidikan Agama, dapat dilakukan melalui pemberdayaan slot-slot kurikulum atau penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak mulia, memiliki intensitas untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama, dengan memberi penekanan pada berbagai kompetensi dasar sebagaimana telah terpapar di atas. Kemudian, juga harus dilakukan dalam pendekatan deduktif dengan kajian yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, norma hukum, etik, maupun norma sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, Rekonseptualisasi

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa dan negara yang wilayahnya berupa kepulauan, terdiri lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil.¹ Masyarakat yang mendiami setiap pulau memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Menurut Jimmy, terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, dan di Papua saja terdapat 270 suku. Negara dengan bahasa daerah yang terbanyak, yaitu, 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.² Banyaknya etnis suku bangsa merupakan hal wajar, realitas ini merupakan fitrah dan

usaha memberlakukan maupun membentuk suatu keseragaman adalah tindakan intoleran yang dapat menimbulkan ekses. Contoh dari ekses tersebut, diantaranya, Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, adalah salah satu konflik yang paling dahsyat yang pecah setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai 2002 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara.³ Sebelum pecahnya konflik komunal agama di kota Ambon, ada beberapa pertempuran antar-

1 Wahyono S.K, *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: Teraju 2009), hal. 1.

2 Jimmy B. Oentoro, *Indonesia Satu, Indoneisia Beda, Indonesia Bisa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 386.

3 Brown, Graham., Wilson, Christopher dan Hadi, Suprayoga., "Overcoming Violent Conflict: Peace and Development Analysis in Maluku and North Maluku", Vol. 4, *Bappenas*, (Jakarta: United Nations Development Programme dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005)

agama di beberapa daerah lain di Indonesia. Pada November 1998, kerusuhan pecah di Ketapang, Jakarta Utara, antara preman Ambon Kristen, dan Muslim.

Menurut Timor Pradopo mengungkapkan 1.600 titik rawan konflik tersebar di seluruh Indonesia. Kapolri mengungkapkan itu saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/9). Kapolri mengakui terjadi peningkatan jumlah kasus bentrokan dan konflik sosial dari 2011 hingga 2012. Pada 2012, sebanyak 88 kasus konflik sosial terjadi akibat berbagai faktor, diantaranya isu SARA, perebutan lahan, dan kisruh Pilkada.⁴ Jika dilihat dari perspektif teori aksi kebudayaan, tindakan dehumanisasi dan hilangnya nilai-nilai religiusitas (kerusuhan) itu terjadi karena berlakunya teori serangan budaya (tindakan anti dialogis). Menurut Paulo Freire, dalam gejala ini para penyerang menyusup kedalam lingkungan kebudayaan kelompok lain, dan tanpa menghiraukan potensi kebudayaan tersebut, mereka memaksakan pandangan dunianya sendiri kepada orang-orang yang mereka serang dan menghambat kreativitas kaum terserang dengan mengendalikan ungkapan-ungkapan kejiwaan mereka.⁵

Realitas konflik tersebut menandakan minimnya pengetahuan masing-masing individu terhadap karakter, identitas, adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu, disebabkan lemahnya

⁴ [http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/09/03/158694/Kapolri-Akui-1.600-Titik-Rawan-Konflik-di-Indonesia/1.Kapolri Sebut 1.600 Titik di Indonesia Rawan Konflik](http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/09/03/158694/Kapolri-Akui-1.600-Titik-Rawan-Konflik-di-Indonesia/1.Kapolri%20Sebut%201.600%20Titik%20di%20Indonesia%20Rawan%20Konflik).

⁵ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2008), hal. 169.

penerapan ideologi, nasionalisme, wawasan kebangsaan, terlebih lagi perkembangan politik Indonesia yang semakin jauh dari wawasan kebangsaan dan etika politik sebagaimana terkandung dalam filsafat bangsa karena akibat tekanan globalisasi.⁶ Terisolirnya dan minimnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya humanisasi dan religiusitas di negara Indonesia yang memiliki kemajemukan agama dan kepercayaan, etnis dan kebudayaan merupakan suatu tindakan pelanggaran inskontitusional pemerintah atas penyelenggaraan pendidikannya, sebab kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis, sosiologis, antropologis Indonesia serta ketidak mampuannya melahirkan *sence of sociality*. Ingat, pendidikan didaulat untuk dapat mendidik, membekali dimensi IQ, EQ, SQ peserta didik sehingga memperoleh kesuksesan.

Menurut para ahli kecerdasan, kesuksesan seseorang diantaranya dipengaruhi oleh dimensi kecerdasan sosial, dan kecerdasan sosial sangat dibutuhkan dalam lingkungan yang multikultur maupun plural. Disamping itu, menurut Paulo Freire, pengetahuan diciptakan secara sosial, dibuat dan dibuat lagi, serta dipelajari.⁷ Dalam konteks Indonesia, yang plural dan multikultur, pendidikan yang berbasis multikultural menjadi sangat dibutuhkan dan strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik sosial destruktif yang

⁶ Kaelan, M.S., *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2003), hal. 1.

⁷ Paulo Freire, *Pendidikan Masyarakat Kota*, terj Agung Prihantoro, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hal. 113.

muncul akibat eksekusi dari transformasi dan reformasi sosial dapat diminimalisir dan dikelola secara cerdas. Dalam perspektif ini, pendidikan jelas mempunyai peranan kunci dalam mengusung idealisme masyarakat multikultural dan *cross-cultural* secara humanis dan religius. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia. Dalam mengkaji pendidikan multikulturalisme tersebut, setidaknya mencakup beberapa permasalahan berikut; pertama, apa yang mendasari adanya pendidikan multikultural, kedua, apa definisi dan makna dari pendidikan multikultural, ketiga, bagaimana arah dan peluang untuk menyelenggarakan pendidikan multikultural di Indonesia, keempat, bagaimana strategi membangun pendidikan multikultural, kelima, bagaimana kurikulumnya dan implementasinya.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pendidikan Multikultural

a. Realitas Bangsa yang Multi kultur dan sangat Plural

Keragaman adalah fitrah dan sunatullah, manusia tidak bisa lari dari kenyataan tersebut sebab *sunatulloh* merupakan sarana memadu kasih antar sesama serta menutup simbolisasi kehidupan. *Sunatulloh* menggambarkan adanya hukum keseimbangan, positif negative, kepasangan (*zaujan*). Qurays Syihab menyatakan "adanya perbedaan tersebut agar terjalin hubungan baik dan motifator untuk berlomba menjadi yang terbaik.⁸ Keanekaragaman agama, etnik,

⁸ Qurays Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 347.

budaya, kepentingan regional internasional dan sejarah kolonial, tradisi, globalisasi, konflik dingin antara negara adidaya, konflik elit politik, krisis moneter, merupakan fakta multikultural dan realitas pluralitas bangsa Indonesia.

Fenomena itu membuktikan fakta keberagaman, kebhinekaan, pluralis, multikulturalis, dan fakta tersebut merupakan sunatullah. Imam Syafi'i (W 204 H) menuturkan "semua realitas kehidupan suatu bangsa adalah syarah (penjelas) bagi sunnah, sedangkan sunah merupakan syarah bagi Al-Qur'an. Sementara isi Al-Qur'an adalah syarah bagi ismul a'dhom".⁹ Maknanya, bahwa realitas sosial merupakan salah satu media yang berfungsi untuk menafsirkan¹⁰ dan menjelaskan Al-Qur'an berdasarkan atas paradigma atau teori-teori sosial yang tetap menjaga nilai-nilai *innocent of Qur'anic*.

Konsep imam syafi'i tersebut sangat perlu disebar luaskan kepada warga negara Indonesia yang hidup dalam lingkungan plural dan multikultur, sehingga realitas kemajemukan bangsa dapat selalu terikat dalam ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang secara implisit menempatkan multikulturalisme dan pluralisme¹¹ sebagai ideologi juga.

⁹ *Ibid*, hal. 271.

¹⁰ Dalam menafsirkan Al-Qur'an, analisis konteks cukup berperan penting dalam memahami peristiwa pewahyuan, sebab konsep 'wahyu' itu tidak akan dapat dimengerti kecuali dengan melihat konteks sebelumnya. Hal ini menandakan terdapat hubungan antara realitas (sebagai konteks) dengan teks. Seseorang tidak mungkin mengerti dan dapat memahami dengan mengambil teks diluar realitas. Moh. Shofan, *Jalan Ketiga pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2006), hal. 40.

¹¹ Menurut Tilaar, didalam pluralisme inilah tersimpan kekuatan yang sangat besar yaitu kapital

Multikulturalisme sebagai ideologi yang bercorak *rahmat lil 'alamin*, menawarkan gagasan *equality*, toleransi dan kausalitas yang saling membutuhkan dan berfungsi positif dalam kesatuan ummat.

Menurut Qurays "kata *أمة* yang terambil dari kata *أعم – يؤم* berarti menuju, menumpu dan meneladani, dari akar kata yang sama lahir antara lain yang berarti ibu dan imam. Keduanya merupakan pemimpin karena menjadi teladan. Ikatan persamaan apapun yang menyatukan makhluk hidup "manusia atau binatang", seperti jenis, suku, bangsa, ideologi atau agama dan sebagainya, maka ikatan itu telah menjadikan satu ummat.¹² Dengan demikian, ummat dapat diartikan sebagai sebuah fakta semakin bercampur baurnya penduduk dunia. Fakta tersebut mampu memberikan tekanan pada sistem pemerintahan, pendidikan dan ekonomi yang telah mapan untuk berubah menjadi dasar ideologi baru.

Menurut Zakiyuddin, sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme merupakan sebuah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kebudayaan yang sama dengan setiap kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya.¹³ Artinya, ideologi

budaya berupa beragam adat-istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang mengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan. H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 257.

12 Qurays Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 325-329.

13 Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 4.

merupakan suatu sistem kepercayaan yang komprehensif, diikuti oleh berbagai kelompok sosial yang anti dominasi untuk mewujudkan suatu nasion. Nasion adalah suatu organisasi kesatuan solidaritas kebangsaan. Mungkin saja seseorang adalah warga negara Indonesia tetapi dia tidak merasa sebagai bagian dari nasion Indonesia. Nasion Indonesia merupakan suatu kesatuan solidaritas yang baru, yang anggotanya berasal dari nasion-nasion yang mungkin telah lama berada didalam masyarakat Indonesia, seperti di Jawa, Minangkabau, tetapi juga termasuk keturunan Cina, Arab, dan Eropa, yang telah menetap di Nusantara ini, yang sudah menganggap sebagai tanah airnya sendiri.¹⁴

b. Dasar Negara

Setengah abad lebih pancasila dan UUD '45 yang mengandung makna toleransi, kasih sayang persaudaraan, persatuan dirumuskan untuk menata republik Indonesia yang plural dan multikultur, dengan dalih kembali kepada Qur'an dan sunnah, sebagian kelompok berusaha untuk mengganti dengan paham yang berbau *ashobiyin*. Padahal, Qur'an dan hadist merupakan referensi sosialis yang menganjurkan kasih sayang, menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan, dan hal itu telah terkafer dalam pancasila dan UUD '45. Amanat tentang pendidikan multikultural sebenarnya telah tersirat dalam undang-undang dasar negara Indonesia dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

14 H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 115.

Nasional Pasal 4 UU NO. 20 Tahun 2003. Undang-undang itu menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dasar perundangan tersebut juga mengacu pada Pancasila, menurut Hamengku Buwono, untuk bangsa yang mejemuk seperti kita, semangat persatuan dan kesatuan yang bersumber pada Pancasila, juga menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena perbedaan suku, asal-usul maupun agama.¹⁵ Disamping itu, Pancasila formal mempunyai akar yang dalam pada sejarah, peradaban, agama, hidup ketatanegaraan, kegotongroyongan, struktur sosial dari masyarakat Indonesia yang diciptakan oleh kebudayaan dan aliran pemikiran atau semangat pemikiran kebatinan bangsa Indonesia.¹⁶ Atas dasar Undang-Undang dan nilai luhur Pancasila, selayaknya wawasan multikulturalisme diintegrasikan dalam pendidikan nasional, sebab wawasan ini sangat berpengaruh dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semangat kemerdekaan RI 1945 menjadikan multikulturalisme sebagai common platform dalam mendesign pembelajaran yang berbasis Bhineka Tunggal Ika dan menutup rapat-rapat pretensi untuk kembali pada teori *melting pot* atau *salad bowl*, melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan

Agama, Seni Budaya, dan lain sebagainya.

Menurut H.A.R. Tilaar, bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu, pertama, pendidikan multikultural haruslah berdimensi "*right to culture*" dan identitas lokal. Kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. Ketiga, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. Keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenophobia, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama. Kelima, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia didalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada. Keenam, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini

15 Hamengku Buwono X, *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 93.

16 P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hal. 17.

perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang plural.¹⁷

2. Definisi Pendidikan Multikultural

Multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, and cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school.

Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.¹⁸

Kondisi itu menandakan adanya kealpaan peserta didik terhadap keadaan pluralism dan multikulturalisme yang pernah menjelma menjadi sebuah nasion dalam melawan penjajahan di Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaan RI 1945. Menurut Tilaar, didalam pluralisme inilah tersimpan kekuatan yang sangat besar

17 H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 185-190.

18 Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice. Review of Research in Education*. 1993:1

yaitu kapital budaya berupa beragam adat-istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang mengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan.¹⁹ Banks menambahkan bahwa Pendidikan Multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.²⁰ Artinya, bahwa dalam pendidikan multikultural terdapat pengakuan atas keragaman budaya yang berfungsi untuk membentuk ide dan kesadaran akan pentingnya nilai keragaman budaya, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses.

a. Kesadaran Akan Pentingnya Nilai Keragaman Budaya

Akhir-akhir ini, media cetak dan elektronik sering memberitakan tentang kejadian kekerasan dalam pendidikan dari pelajar²¹ maupun mahasiswa.²² Oleh

19 H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme*, (Jakarta : Grasindo, 2004), hal. 257.

20 James A. Bank dan Cherry A. McGee (ed). *Handbook of Research on Multicultural Education* (San Francisco: Jossey-Bass, 2001), hal. 28.

21 TEMPO.CO, Jakarta, Senin, 24 September 2012, Begini Kronologi Tawuran Siswa SMA 6 Versus SMA 70, Tawuran antara siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 6 dan SMAN 70 di bundaran Bulungan, Jakarta Selatan, Senin, 24 September 2012, menyebabkan seorang siswa SMA 6 tewas. <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/24/064431613/Begini-Kronologi-Tawuran-Siswa-SMA-6-Versus-SMA-70>, diakses 1 November 2012

22 Hendra Cipto | Kamis, 11 Oktober 2012, Tawuran, 2 Mahasiswa Tewas di Makassar, MAKASSAR, KOMPAS.com — Aksi tawuran antarmahasiswa di Universitas Veteran RI (UVRI) di Kota Makassar, Kamis (11/10/2012),

sebab itu, pendidikan harus mampu menyadarkan warga sekolah atas keunggulan dan kekuatan dari keragaman budaya (multikulturalis dan pluralis) yang ada. Kesadaran yang ditanamkan oleh lembaga pendidikan harus kesadaran pada level tertinggi (kesadaran Paulo Freiere).

Pendidikan Multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan atau kepastian adanya namun perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Artinya perbedaan itu perlu kita terima sebagai suatu kewajaran dan perlu sikap toleransi agar kita bisa hidup berdampingan secara damai tanpa melihat unsur yang berbeda itu untuk membeda-bedakan.

b. Gerakan Pembaharuan Pendidikan

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sangat membuka celah diskriminasi, pusat-pinggir, kota-desa, SBI-nonSBI, kaya-miskin, hal itu karena diuntungkan oleh keluarnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional, meski kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang 1945. Padahal jelas-jelas dalam UUD 1945, pemerintah harus menjamin pendidikan warganya supaya menjadi manusia yang cerdas. Jaminan tersebut memberikan pesan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata (Pemerataan Akses) kepada

memakan korban jiwa. Dua mahasiswa asal Fakultas Teknik tewas. <http://regional.kompas.com/read/2012/10/11/17303281/Tawuran.2.Mahasiswa.Tewas.di.Makassar>, diakses 1 November 2012

warganya. Konsep pemerataan akses ini dijadikan tolak ukur pemerintah dalam menilai kredibilitas dan kualitas suatu lembaga pendidikan, meskipun masih menyesak hati kaum dhu'afa. Sebab dalam praktiknya lembaga pendidikan dalam mengukur tingkatan-tingkatan dhu'afa tidak berdasarkan pada pendapatan orang tua (UMR) tapi berdasarkan pada target dari rencana anggaran pendapatan dan belanja sekoah atau perguruan tinggi. Dengan pola manajemen yang seperti itu muncullah istilah-istilah miskin di lembaga pendidikan favorit tapi dianggap kaya di lembaga onfavorit atau pinggiran (miskin dalam perspektif/kontekstualitas miskin).

c. Proses Pendidikan

Sifat pendidikan multicultural adalah suatu proses pendidikan yang tidak boleh dianggap sempurna, tetapi harus selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman, dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus, dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Karena, tujuan utama dari Pendidikan Multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, menyeluruh bukan sekedar meningkatkan skor.

3. Pendidikan Multikultural di Indonesia

Bangsa Indonesia dalam konteks fitrah keragamannya diikat oleh perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu meliputi agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa; warna kulit atau ras; etnis atau kesukuan, dan kebudayaan atau adat kebiasaan. Menempatkan dan menyadari perbedaan empat pilar perbedaan dalam praktik pendidikan haruslah dilakukan.

Bangunan kesadaran akan tercipta manakala seluruh aktivitas pendidikan di Indonesia dimuarakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Ismail Faruqi menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Sangkot, bahwa setidaknya ada empat isu pokok yang dipandang sebagai landasan normative pendidikan Islam multikultural, khususnya di bidang keagamaan, yaitu: 1) kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pean-Nya (wahyu), 2) kesatuan kenabian, 3) tidak ada paksaan dalam beragama, dan 4) pengakuan terhadap eksistensi agama lain.²³

Pendidikan di Indonesia secara perundangan telah diatur dengan memberikan ruang keragaman sebagai bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dasar perundangan ini selain memberi arahan pendidikan di Indonesia juga mewajibkan bahwa pendidikan di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa.

Secara teknis pendidikan multi budaya juga dikembangkan oleh Banks (1993). Banks mendiskripsikan evolusi pendidikan multibudaya dalam empat fase. Pertama, ada upaya untuk mempersatukan

kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. Kedua, hal ini diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Ketiga, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Fase keempat perkembangan teori, riset dan praktik, perhatian pada hubungan antarras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoretisi. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apa pun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Wacana pendidikan multikultural di Indonesia yang didasarkan pada UU Sisdiknas di atas tidak dapat dilepaskan dengan gelombang reformasi pendidikan dunia. Sebagai bangsa, Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh dunia lebih luas. Globalisasi menjadikan keterikatan bangsa-bangsa sebagai kesatuan komunitas dunia.

4. Strategi membangun Pendidikan Multikultural

Kultur merupakan bagian dari hidup semua komunitas manusia dalam sejarahnya dimuka bumi dan sudah eksis jauh semenjak komunitas manusia terisolasi satu sama lain, hingga komunitas itu berinteraksi dan mulai beradaptasi dengan lingkungan dan kultur yang berbeda

²³ Sangkot. November 9, 2007 Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural, diakses 28 Oktober 2012, <http://sangkot.wordpress.com/2007/11/09/landasan-normatif-pendidikan-agama-islam-ultikultural/>

ada sebelum adanya interaksi dengan pihak lain. Pengertian multikulturalisme yang dapat diterima untuk kebutuhan kontemporer adalah bahwa orang-orang dari berbagai kebudayaan yang beragam secara permanen hidup berdampingan satu dengan lainnya; banyak versi multikulturalisme menekankan pentingnya belajar tentang kebudayaan-kebudayaan lain, mencoba memahami mereka secara penuh dan empatik; multikulturalisme mengaplikasikan suatu keharusan untuk mengekspresikan kebudayaan lain dengan kata lain menilainya positif, sehingga semua kelompok memperoleh kemajuan dari pertukaran yang sifatnya material dan manufaktural maupun kultural berupa gagasan-gagasan dari berbagai penjuru dunia.

Pemahaman multikulturalisme sebagai “hidup berdampingan” memberikan satu keuntungan nyata berupa akses terhadap kebutuhan-kebutuhan, ketrampilan, dan sistem pengetahuan atau seni. Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka untuk membentuk negara Indonesia yang kokoh perlu mengembangkan jenis pendidikan multikultural yang dikembangkan dengan prinsip menghargai dan memberi ruang perbedaan-perbedaan di masing-masing daerah dan lembaga pendidikan. Dengan demikian pendidikan berfungsi sebagai alat preferentif terhadap terjadinya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama, sebagai alat untuk menumbuhkan sikap mau mengalah dari *preference* yang dikehendaki elit, menanamkan etnisitas sebagai sumber kekayaan hakiki yang

dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya, serta menjadi salah satu media jejaring sosial.

5. Kurikulum Pendidikan Multikultural

Konsekuensi logis pendidikan nasional terhadap kondisi multikultural dan plural adalah menyelenggarakan kurikulum pendidikan nasional yang bercorak multikultural. Pendidikan multikultural yang ditawarkan sebaiknya tidak sekedar menyajikan ciri khas dari setiap kebudayaan yang ada, penghormatan dan apresiasi saja, tetapi kurikulum perlu mengajarkan materi yang dapat mentransformasikan paradigma konservatif, primordial ke paradigma nation, dengan kata lain pendidikan multikultural harus bersifat transformatif.

Menurut Zakiyuddin, sebagai proses transformasional, pendidikan multikultural hadir sebagai proses melalui mana seluruh aspek pendidikan diuji dan dikritik serta dibangun kembali atas dasar ideal-ideal persamaan dan keadilan social; membantu perkembangan semua orang dari semua kebudayaan untuk menjadi aktivis dalam menghadapi ketidakadilan yang menimpa mereka atau orang lain; mengkonstruksi identitas diri yang diakui banyak orang dan percaya diri; mengembangkan cara-cara berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dan kebudayaan secara empatik, sesuai dan diakui; belajar menjadi pemikir kritis terhadap berbagai bentuk diskriminasi; dan membangun kerjasama dengan orang lain untuk menciptakan perubahan-perubahan konkret pada level interpersonal dan institusional.²⁴ Oleh

²⁴ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan...*, hal. 118.

karena itu, pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada empat prinsip. Pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Kedua, keragaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum, seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Ketiga, budaya dilingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. Keempat, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional.

Implementasi pendidikan multikultur pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan kewarganegaraan dan melalui Pendidikan Agama, dapat dilakukan melalui pemberdayaan slot-slot kurikulum atau penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak mulia, memiliki intensitas untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama, dengan memberi penekanan pada berbagai kompetensi dasar sebagaimana telah terpapar di atas. Kemudian, juga harus dilakukan dalam pendekatan deduktif dengan kajian yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, norma hukum, etik, maupun norma sosial kemasyarakatan. Pendidikan multikultur melalui pendidikan kewarganegaraan dan Pendidikan Agama harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari design

perencanaan dan kurikulum melalui proses penyisipan, pengayaan dan atau penguatan terhadap berbagai kompetensi yang telah ada, mendesign proses pembelajaran yang bisa mengembangkan sikap siswa untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahasa dan budaya. Dan terakhir pendidikan hasil dan pencapaian pendidikan multikultur harus dapat dikur melalui evaluasi yang relevan, apakah melalui instrumen tes, non-tes atau melalui proses pengamatan longitudinal dengan menggunakan portofolio siswa. Sesuai dengan kompetensi standar tersebut, maka dapat dikembangkan beberapa kompetensi dasar sebagai berikut:

- a. Menjadi warga negara yang menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan etnik, agama, bahasa dan budaya dalam struktur masyarakatnya.
- b. Menjadi warga negara yang bisa melakukan kerjasama multi etnik, multi kultur, dan multi religi dalam konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa.
- c. Menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpamembedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya, bahkan untuk memelihara bahasa dan mengembangkan budaya mereka.
- d. Menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk terwakili gagasan dan aspirasinya

dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.

- e. Menjadi warga negara yang mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan terhadap semua warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya mereka.

Dengan kompetensi-kompetensi dasar tersebut, maka pembelajaran multikultur diharapkan akan menghasilkan warga negara yang memiliki sikap dan kebiasaan multikultur dengan sikap dan perilaku yang toleran antar semua anak bangsa, solid dan bisa saling bekerjasama untuk kepentingan bangsa, bersikap egaliter, memiliki sikap empati sesama warga, dan bersikap adil dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, bahasa dan warna kulit. Sejalan dengan konsepsi ini, Jhon Dewey merekomendasikan tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan sebuah kurikulum. "Pertama, hakikat dan kebutuhan peserta didik. Kedua, hakikat dan kebutuhan masyarakat. Dan ketiga, masalah pokok yang digumuli peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan pribadi lain dalam masyarakat".²⁵ Dengan demikian pendidikan multikultur harus direncanakan dalam sebuah design pengembangan kurikulum yang integratif, sekwenitif dan didukung dengan lingkungan serta struktur dan budaya yang bisa memberikan kontribusi

positif terhadap pembinaan sikap dan perilaku multikultur. Pendidikan multikultur, secara substantif harus bisa menjadi bagian integral dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran Pendidikan Agama sebagai pendidikan nilai. Tema-tema multikultur harus disajikan dalam skope yang komprehensif sebagai upaya pencapaian berbagai kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.

C. PENUTUP

Realitas bangsa Indonesia yang multi kultur di mana terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya dan lainnya menjadi niscaya bahwa pendidikan multikultur relevan menjadi dasar perlunya konsep pendidikan multikultural selain karena dasar negara Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang telah mengakar dalam diri masyarakat Indonesia.

Pendidikan berfungsi sebagai alat prefentif terhadap terjadinya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama, sebagai alat untuk menumbuhkan sikap mau mengalah dari *prefence* yang dikehendaki elit, menanamkan etnisitas sebagai sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya, serta menjadi salah satu media jejaring sosial.

Implementasi pendidikan multikultur pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan kewargaan dan melalui Pendidikan Agama, dapat dilakukan melalui pemberdayaan slot-slot kurikulum atau penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar

²⁵A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1998), hal. 68.

dalam konteks pembinaan akhlak mulia, memiliki intensitas untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama, dengan memberi penekanan pada berbagai kompetensi dasar sebagaimana telah terpapar di atas. Kemudian, juga harus dilakukan dalam pendekatan deduktif dengan kajian yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, norma hukum, etik, maupun norma sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidhaw, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga.
- Bank, James A. dan Cherry A. McGee (ed). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Banks, J. 1993. Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice. *Review of Research in Education*.
- Brown, Graham., Wilson, Christopher dan Hadi, Suprayoga. 2005. "Overcoming Violent Conflict: Peace and Development Analysis in Maluku and North Maluku", Vol. 4, *Bappenas*, (Jakarta: United Nations Development Programme dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Buwono X, Hamengku. 2007. *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, A. Malik. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI.
- Freire, Paulo, 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Freire, Paulo, 2008. *Pendidikan Masyarakat Kota*, terj Agung Prihantoro, Yogyakarta : LKiS.
- <http://regional.kompas.com/read/2012/10/11/17303281/Tawuran.2.Mahasiswa.Tewas.di.Makassar>, diakses 1 November 2012
- [http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/09/03/158694/Kapolri-Akui-1.600-Titik-Rawan-Konflik-di-Indonesia/1.Kapolri Sebut 1.600 Titik di Indonesia Rawan Konflik](http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/09/03/158694/Kapolri-Akui-1.600-Titik-Rawan-Konflik-di-Indonesia/1.Kapolri%20Sebut%201.600%20Titik%20di%20Indonesia%20Rawan%20Konflik)

- <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/24/064431613/Begini-Kronologi-Tawuran-Siswa-SMA-6-Versus-SMA-70>, diakses 1 November 2012
- M.S., Kaelan, 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Oentoro, Jimmy B., 2010. *Indonesia Satu, Indoneesia Beda, Indonesia Bisa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- S.K., Wahyono, 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.
- Shihab, Qurays, 2007. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, Qurays, 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shofan, Moh., 2006. *Jalan Ketiga pemikiran Islam*. Yogyakarta : Ircisod.
- Sirait, Sangkot. November 9, 2007 Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural, diakses 28 Oktober 2012, <http://sangkot.wordpress.com/2007/11/09/landasan-normatif-pendidikan-agama-islam-ultikultural/>
- Suwarno, P.J., 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tilaar, H.A.R., 2004. *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.